

Analisis Ketahanan Pangan Kota Bandung Berdasarkan Peta FSVA Tahun 2023

Food Security Analysis of Bandung City Based on the 2023 FSVA Map

**Eka Purna Yudha*, Riska, Fitri Fauza Fadillah, Hersya Nuriska Anandita,
Biru Angeli Nirwana**

Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang

*Email: eka.purna.yudha@unpad.ac.id

(Diterima 29-06-2026; Disetujui 30-07-2026)

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan perkotaan, khususnya di Kota Bandung yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ketahanan dan kerentanan pangan Kota Bandung berdasarkan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Tahun 2023 dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan pada tiga dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, melalui indikator lahan dan produksi pertanian, sarana penyedia pangan, tingkat kesejahteraan penduduk, akses transportasi, akses air bersih, serta rasio tenaga kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah akibat keterbatasan lahan pertanian dan rendahnya kontribusi sektor pertanian. Meskipun sebagian besar Kelurahan tergolong tahan pangan, masih terdapat Kelurahan dengan kerentanan rendah hingga sedang yang dipengaruhi oleh ketimpangan akses air bersih, keterbatasan tenaga kesehatan, dan penduduk berpendapatan rendah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan ketahanan pangan berbasis wilayah yang berkelanjutan.

Kata kunci: ketahanan pangan, FSVA, kerentanan pangan, wilayah perkotaan, Kota Bandung

ABSTRACT

Food security is a strategic issue in urban development, particularly in Bandung, which has a high population density. This study aims to analyze the condition of food security and vulnerability in Bandung City based on the 2023 Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) using a quantitative descriptive approach. The analysis was conducted on three dimensions of food security: food availability, access, and utilization, through indicators of land and agricultural production, food supply facilities, population welfare, transportation access, clean water access, and the ratio of health workers. The results show that Bandung City is highly dependent on food supplies from outside the region due to limited agricultural land and the low contribution of the agricultural sector. Although most urban villages are classified as food secure, there are still low to moderately vulnerable villages affected by unequal access to clean water, limited health workers, and low-income populations. This study emphasizes the importance of strengthening sustainable, region-based food security policies.

Keywords: food security, FSVA, food vulnerability, urban areas, Bandung City

PENDAHULUAN

Kota Bandung, sebagai pusat perekonomian dan ibu kota Provinsi Jawa Barat, memainkan peran vital dalam dinamika ekonomi regional. Dengan struktur administratif yang terdiri atas 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, kota ini menjadi salah satu titik sentral dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya di Jawa Barat. Menurut data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung pada Tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 2.545.007 jiwa, menegaskan posisinya sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia.

Secara geografis, Kota Bandung terletak di antara 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan, dengan batas administratif yang berdekatan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kota Cimahi. Wilayah seluas 167,31 km² ini menjadi rumah bagi masyarakat yang beragam dalam latar belakang etnis, budaya, dan ekonomi. Kondisi geografis dan demografis yang heterogen ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat kota.

Kota Bandung juga dikenal dengan kondisi iklimnya yang cenderung sejuk dengan pola curah hujan tipe D. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat suhu rata-rata Kota Bandung sebesar 25,35°C selama tahun 2022. Suhu tertinggi terjadi pada bulan September, mencapai 32,2°C

sementara suhu minimum terendah terjadi pada bulan Juli, mencapai 16,8°C. Kondisi ini mempengaruhi sektor-sektor ekonomi dan kehidupan sehari-hari penduduk Kota Bandung, seperti pertanian, pariwisata, dan kesejahteraan sosial.

Selain aspek demografis dan klimatologi, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tercermin dalam indikator PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB Per Kapita. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menjadi tolok ukur kemampuan ekonomi wilayah, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Informasi tentang ketahanan pangan dan gizi menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan pembangunan. Melalui Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), pemerintah dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan secara cepat, serta mengalokasikan sumber daya dan investasi yang tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat di tingkat kelurahan. Ini membuktikan pentingnya pengembangan FSVA hingga tingkat desa/kelurahan, mengingat kondisi ekologi yang beragam dan dinamis di Kota Bandung serta untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis spasial dan analisis indikator ketahanan pangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di Kota Bandung berdasarkan indikator Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2023.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2024 dengan menggunakan data sekunder terbaru yang tersedia hingga tahun 2023.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi data kependudukan, sosial ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan pangan. Data diperoleh dari:

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung
- Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Bandung
- Dokumen resmi FSVA Kota Bandung Tahun 2023

Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel penelitian disusun berdasarkan tiga dimensi ketahanan pangan FSVA, yaitu:

1. Ketersediaan pangan, meliputi luas lahan pertanian, produksi pangan, serta sarana dan prasarana penyedia pangan.
2. Akses atau keterjangkauan pangan, meliputi rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dan akses transportasi.
3. Pemanfaatan pangan, meliputi akses air bersih dan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui:

1. Normalisasi dan penggabungan indikator FSVA untuk menentukan indeks ketahanan pangan.
2. Analisis spasial menggunakan peta FSVA guna mengidentifikasi tingkat ketahanan dan kerentanan pangan pada setiap kelurahan.
3. Analisis deskriptif untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kerentanan pangan serta implikasinya terhadap kebijakan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketersediaan Pangan

Menurut Undang-Undang RI nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Menurut Tono dkk dalam analisis kebijakan pertanian menyebutkan bahwa terdapat tujuh indikator dalam dimensi ketersediaan pangan, diantaranya yaitu kecukupan pasokan, penelitian dan pengembangan pertanian (litbangtan), infrastruktur pertanian, volatilitas produksi pertanian, hambatan politik dan sosial dalam akses pangan, kehilangan pangan, dan komitmen kebijakan dan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan yang optimal diperoleh ketika kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Lahan Pertanian

Lahan dibagi menjadi dua jenis menurut penggunaannya yaitu lahan pertanian dan non pertanian. Lahan pertanian merupakan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian seperti sawah dan perkebunan, sedangkan lahan non pertanian meliputi permukiman, industri, perkantoran dan lain sebagainya. Lahan pertanian merupakan salah satu indikator untuk menyusun FSVA suatu daerah karena lahan pertanian memiliki hubungan positif dengan tingkat ketersediaan pangan di daerah tersebut. Semakin tinggi rasio luas pertanian terhadap jumlah penduduk di suatu daerah maka ketersediaan pangan di daerah tersebut semakin baik, begitupun sebaliknya.

Menurut BPS tahun 2023 Kota Bandung mengalami penurunan dalam memberikan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 0,11%, tahun 2019 2020 dan 2021 sebesar 0,10% serta pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 0,09%. Pertumbuhan penduduk serta alih fungsi lahan ke non pertanian menjadi penyebab utama penurunan tersebut karena menurut Hasanah (2021) pertumbuhan penduduk akibat meningkatnya aktivitas ekonomi di suatu wilayah dapat menyebabkan masyarakat beralih ke wilayah tersebut yang akhirnya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal akan meningkat. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan swasembada pangan dan pembangunan berkelanjutan, sehingga jika tidak ada pengendalian pemerintah maka akan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan baik itu di daerah, provinsi maupun nasional. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan, sehingga tercapai kesejahteraan petani dan masyarakat umumnya.

Menurut DKPP tahun 2022 Kota Bandung memiliki luas lahan sawah seluas 702 ha, 287 ha lahan kebun, 28 ha ladang serta 15,17 ha lahan yang tidak diusahakan. Luas lahan sawah yang dilindungi (LSD) di Kota Bandung pada tahun 2022-2042 menurut Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) hanyalah sebesar 278,19 ha saja. Untuk memenuhi ketersediaan pangan, maka Kota Bandung memerlukan banyak pasokan pangan dari luar daerah. Saat ini ketergantungan Kota Bandung terhadap pasokan pangan dari daerah lain sangatlah tinggi yaitu 96,42%, sehingga hal ini menjadi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Bandung.

Produksi Pangan

Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Bandung pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,09%, meliputi usahatani, peternakan, perikanan dan kehutanan. Komoditas yang masih memiliki peluang untuk dibudidayakan di kota Bandung yaitu komoditas padi dan palawija, dengan jumlah produksi yang masih berfluktuasi baik itu untuk produksi padi maupun palawija. Tahun 2022 Kota Bandung mengalami kenaikan produksi pangan pada komoditas kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Strategi untuk mencapai kemandirian atau menyediakan pangan sendiri bagi keluarga dan masyarakat yaitu dengan memanfaatkan secara optimal lahan tidak terpakai atau tidak produktif.

Sejak tahun 2020 pemerintah Kota Bandung melakukan kegiatan urban farming terintegrasi melalui Model “Buruan SAE” yang ditujukan untuk menanggulangi ketimpangan permasalahan pangan yang ada di Kota Bandung melalui pemanfaatan pekarangan atau lahan yang ada dengan berkebun beraneka ragam pangan. Produk pertanian yang dikembangkan di Buruan SAE yaitu sayuran, ikan, telur, tanaman obat dan buah-buahan serta pengelolaan sampah pertanian. Jumlah kelompok Buruan SAE hingga akhir 2022 terdapat sebanyak 375 kelompok.

Tabel 1. Jumlah Panen Kelompok Buruan SAE

No.	Jenis Produk	Jumlah Panen Kelompok Buruan Sae (Kg)
1.	Pertanian	2.517
2.	Perikanan	158
3.	Peternakan	184
4.	Olahan Sampah	219
Total Panen		3.078

Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan

Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan secara berkelanjutan. Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Perbandingan jumlah sarpras penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga memiliki hubungan positif dengan tingkat ketersediaan pangan di daerah tersebut.

Keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan masyarakat. Infrastruktur seperti pasar, jalan, dan sistem distribusi pangan menjadi penghubung utama antara daerah produsen dengan konsumen. Apabila sarana distribusi pangan tidak memadai, maka proses penyaluran bahan pangan dapat terhambat karena menurut Arifin dan Solihin (2025) ketika infrastruktur kurang baik, proses pengiriman pangan dapat menghambat proses pengiriman ke pasar, sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan di masyarakat. Maka dari itu, keberadaan sarana penyedia pangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung stabilitas pangan di wilayah perkotaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah sarpras yang ada di Kota Bandung mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Penurunan jumlah sarpras penyedia pangan dari tahun 2021 hingga 2022 sebesar 2,60% yang tersebar di 151 kelurahan disebabkan oleh dampak pandemi covid-19. Kelurahan rentan tinggi terhadap ketersediaan pangan yang disebabkan kurangnya jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (Prioritas 1) salah satunya adalah di Kelurahan Jamika (Kecamatan Bojongloa Kaler), Prioritas 2 salah satunya di Kelurahan Cibuntu dan Cijerah (Kecamatan Bandung Kulon) sedangkan Prioritas 3 salah satunya di Kelurahan Gempolsari dan Cigondewah Kaler (Kecamatan Bandung Kulon). Terdapat total kelurahan rentan tinggi (prioritas 1) terhadap ketersediaan pangan akibat kurangnya jumlah sarpras penyedia pangan yaitu 13 kelurahan, prioritas 2 sebanyak 30 kelurahan dan prioritas 3 sebanyak 30 kelurahan.

Keterjangkauan atau Akses Pangan

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan merupakan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik dari yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya akses ekonomi seperti kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi, akses fisik seperti keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan, dan akses sosial seperti modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan akses pangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Amalia dkk. (2024) yang menyatakan bahwa aspek keterjangkauan pangan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Keterjangkauan pangan dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat, akses terhadap infrastruktur, serta distribusi pangan yang memadai. Meskipun pangan tersedia di suatu wilayah, rumah tangga masih dapat mengalami kerawanan pangan apabila memiliki keterbatasan daya beli dan akses terhadap sumber pangan.

Dalam penyusunan FSVA Kota Bandung, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya akses ekonomi dan akses fisik, dimana rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan dan kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air, atau udara.

Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah

Penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah diasumsikan sebagai penduduk yang tidak memiliki daya beli yang memadai untuk mengakses pangan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga rawan dalam ketahanan pangan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran

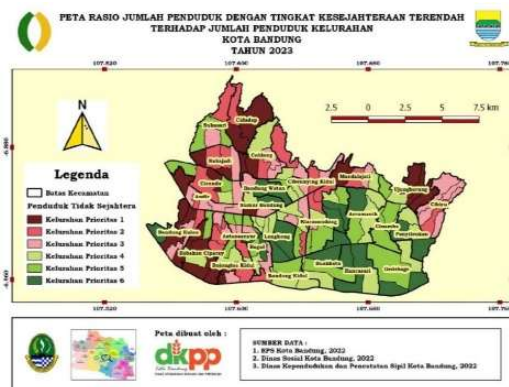
per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan yaitu sebesar Rp. 550.458/kapita/bulan (BPS, 2023) berhak mendapatkan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.



Gambar 1. Jumlah / Persentasi Penduduk Miskin Kota Bandung 2014-2022

Penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Bandung berlangsung dari tahun ke tahun hingga tahun 2019. Fenomena meningkatnya jumlah penduduk miskin, puncaknya pada tahun 2020 adalah akibatnya pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung, persentase penduduk miskin di Kota Bandung pada Maret 2023 adalah sebesar 3,96% atau setara dengan 113.160 jiwa. Angka ini menunjukkan masih ada sebagian kecil penduduk Kota Bandung yang hidup dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Adapun beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kesejahteraan rendah di Kota Bandung, seperti akses terhadap pekerjaan dan penghasilan (tingkat pengangguran, pekerjaan informal, upah minimum), akses terhadap pendidikan (tingkat pendidikan, kualitas pendidikan) akses terhadap layanan dasar (air bersih, sanitasi, layanan kesehatan), dan faktor lainnya seperti bencana alam, penyakit, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan, seperti memperluas akses terhadap pekerjaan dan penghasilan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar, dan memberikan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (BKH).



Gambar 2. Peta Rasio Jumlah Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah terhadap Jumlah Penduduk Kelurahan Kota Bandung Tahun 2023

Akses Transportasi

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan ketersediaan pasar yang buruk akan memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang kurang memadai. Salah satu faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah pada sektor pertanian adalah rendahnya harga komoditas di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani adalah akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan menjadi lebih tinggi jika melewati jalanan setapak atau jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan sebab daerah tersebut tidak memadai jika dilintasi oleh kendaraan.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik tentu akan menarik investasi yang lebih besar bagi berbagai sektor sehingga menjadi daya dorong bagi kehidupan yang berkelanjutan. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan berpengaruh pada pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur saja belum cukup untuk menjamin kesejahteraan petani.

Kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan jalan adalah tingkat kondisi jalan sebanyak 95% (baik dan sedang) dibandingkan dari jumlah panjang jalan keseluruhan Kota Bandung. Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa kondisi jalan yang baik adalah sebesar 72,48%, jalan sedang sebesar 18,29%, jalan rusak ringan sebesar 9%, dan jalan rusak berat sebanyak 0,13%. Sebenarnya semua kelurahan di Kota Bandung memiliki akses penghubung yang memadai bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu yaitu ketika turun hujan/banjir.

Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi kemiskinan, diantaranya:

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- c. Program Kawasan Permukiman
- d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- e. Program Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- g. Program Penyelenggaraan Jalan
- h. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- i. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan lahan meliputi pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan. Dalam penyusunan FSVA Kota Bandung, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Akses Terhadap Akses Air Bersih

Air sangat dibutuhkan bagi manusia untuk memenuhi keseimbangan cairan tubuh. Air minum yang layak dikonsumsi yaitu air yang memenuhi syarat secara fisik, kimia, mikrobiologis, dan zat radioaktif. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih merupakan perbandingan antara rumah tangga miskin dengan sumber air tidak terlindung dan total rumah tangga di kelurahan. Air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan untuk keperluan sehari-hari dan bisa diminum jika dimasak. Sumber air tidak terlindung meningkatkan risiko penyakit dan mempengaruhi status gizi. Air minum layak berasal dari sumber terlindung, seperti air ledeng, sumur bor, atau penampungan air hujan, dan harus berada minimal 10 meter dari pembuangan limbah.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandung, pada tahun 2021 terdapat 2.784 rumah tangga tanpa akses air bersih, meningkat 27,80% pada tahun 2022 yaitu sebanyak 3.558 rumah tangga. Hal ini mayoritas disebabkan karena ketidakmampuan membayar biaya penyediaan air di kawasan permukiman kumuh. Akses air bersih di Kota Bandung masih belum merata, terutama di wilayah pinggiran kota seperti Antapani, Ujungberung, dan Cibiru. Survei telah dilakukan di beberapa wilayah Kota Bandung dan ditemukan bahwa hanya 60% penduduk yang memiliki akses air PDAM. Kualitas air PDAM di beberapa wilayah juga belum optimal. Hal ini dilihat dari warna air yang keruh dan bau tidak sehat. Penduduk yang tidak memiliki akses air PDAM terpaksa menggunakan sumber air alternatif seperti air sumur dan air sungai. Dampak dari kurangnya akses air bersih dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diare, kolera, dan tifoid.

Rasio Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan dan memiliki pendidikan serta kewenangan tertentu, sedangkan asisten tenaga kesehatan memiliki pendidikan di bawah jenjang

Diploma III (UU No. 36 tahun 2014). Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk yang dilayani oleh tenaga kesehatan, termasuk dokter, bidan, dan lainnya, dibandingkan dengan kepadatan penduduk.

Rasio tenaga kesehatan di Kota Bandung masih belum ideal. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2021, rasio tenaga kesehatan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- Dokter: 1 dokter per 5.000 penduduk. Rasio ini jauh di bawah standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
- Perawat: 1 perawat per 1.000 penduduk. Rasio ini juga masih di bawah standar nasional, yaitu 1 perawat per 500 penduduk.
- Bidan: 1 bidan per 1.000 penduduk. Rasio ini sudah memenuhi standar nasional.
- Tenaga kesehatan lainnya seperti tenaga gizi, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan, juga masih belum ideal.

Kurangnya tenaga kesehatan di Kota Bandung berdampak seperti antrian yang panjang di fasilitas kesehatan, waktu tunggu yang lama, berkurangnya kualitas layanan kesehatan, dan meningkatnya angka kematian. Tenaga kesehatan penting untuk meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat. Rasio ini mencerminkan kemampuan tenaga kesehatan di desa/kelurahan untuk melayani masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan pangan.

Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

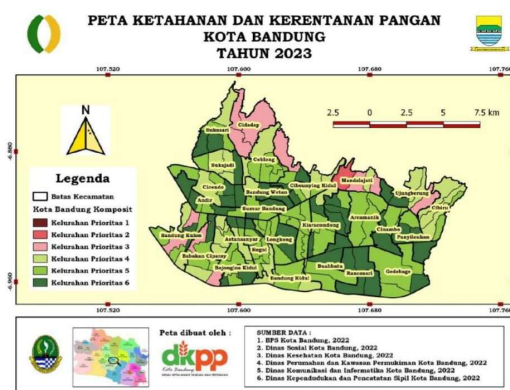
Strategi Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan kelompok rentan adalah:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat: Rumah Sehat, Pembudayaan Hidup Sehat, Penanganan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pengawasan terhadap Makanan yang Dikonsumsi oleh Masyarakat, dan Sosialisasi dan Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berpotensi pada sumberdaya lokal.

Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bandung 2023

Dalam menyediakan informasi terkait ketahanan pangan suatu wilayah yang komprehensif dan akurat, maka disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas- FSVA). FSVA menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis data dari indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Berikut merupakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bandung Tahun 2023.



Gambar 3. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bandung Tahun 2023

Secara umum kelurahan di Kota Bandung memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih rendah atau relatif lebih tahan pangan. Berdasarkan hasil analisis, peta tersebut menunjukkan bahwa terdapat 12 kelurahan yang termasuk kelurahan rentang pangan dari 151 kelurahan yang terdapat di Kota Bandung. Kelurahan rentang pangan di Kota Bandung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 43 kelurahan. Tidak ada kelurahan yang termasuk dalam tingkat kerentanan yang paling tinggi (prioritas 1), namun terdapat 1 kelurahan yang termasuk pada tingkat kerentanan sedang (prioritas 2) yaitu Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang meningkat dengan tingkat kesejahteraan terendah, penurunan jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan, dan jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih meningkat. Walaupun Kelurahan Jatihandap termasuk dalam prioritas 2, namun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) meningkat dari 46,36 menjadi 48,15. Adapun 11 kelurahan yang termasuk dalam tingkat kerentanan rendah terhadap kerawanan pangan (prioritas 3) yaitu Kelurahan Cibuntu dan Cigondewah Kaler (Kecamatan Bandung Kulon), Kelurahan Pasanggrahan (Kecamatan Ujung Berung), Kelurahan Cirangrang dan Babakan (Kecamatan Babakan Ciparay), Kelurahan Sindang Jaya dan Karang Pamulang (Kecamatan Mandalajati), Kelurahan Cigadung (Kecamatan Cibeunying Kaler), Kelurahan Ciumbuleuit, Ledeng, dan Hegarmanah (Kecamatan Cidadap). Selain itu, kelurahan yang agak tahan terhadap kerawanan pangan (prioritas 4) sebanyak 32 kelurahan, kelurahan yang tahan terhadap kerawanan pangan (prioritas 5) sebanyak 63 kelurahan, dan kelurahan yang sangat tahan terhadap kerawanan pangan (prioritas 6) sebanyak 44 kelurahan.

Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

1. Perubahan iklim

Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini seluruh wilayah di Indonesia mengalami perubahan iklim termasuk wilayah Kota Bandung. Perubahan iklim menyebabkan adanya pergeseran musim kemarau atau musim hujan yang sangat berpengaruh terhadap waktu dan pola tanam tanaman pangan. Perubahan iklim ditandai dengan curah hujan yang tidak menentu dan suhu yang semakin tinggi. Perubahan iklim diakibatkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Gas tersebut menghasilkan pemanasan global yang akhirnya terjadi El Nino yang merupakan pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal karena penurunan curah hujan. Hal ini dapat mengakibatkan produksi pertanian semakin menurun sehingga memicu kenaikan harga dan selanjutnya berimbas pada penurunan daya beli pangan rumah tangga. Hal ini akan meningkatkan jumlah daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan dan akhirnya menimbulkan kasus kelaparan pangan ekstrim.

2. Rendahnya sarana dan prasarana penyedia pangan

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana di suatu wilayah akan menghambat proses pendistribusian komoditas pangan tertentu. Semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga pada suatu wilayah maka semakin baik tingkat ketersediaan pangan di wilayah tersebut. Di Kota Bandung terjadi penurunan jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yudha dkk. (2023) yang menyatakan bahwa wilayah perkotaan cenderung lebih rentan terhadap gangguan ketahanan pangan dibandingkan wilayah perdesaan, terutama pada masa pandemi Covid-19. Tingginya kepadatan penduduk, keterbatasan lahan pertanian, serta ketergantungan terhadap distribusi pangan dari luar daerah menyebabkan kawasan perkotaan lebih mudah mengalami gangguan ketersediaan pangan.

UMKM Kota Bandung sebagai penyedia pangan juga merasakan dampak hal tersebut karena mengalami penurunan jumlah penjualan, penurunan produksi, penurunan pendapatan, bahkan gulung tikar. Selain itu, ketersediaan akses jalan di beberapa kelurahan termasuk kelurahan Jatihandap yang kurang memadai sehingga pendistribusian pangan terhambat.

3. Meningkatnya jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah

Jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan terjadinya kerawanan pangan. Ketika jumlah penduduk bertambah, maka membuat kebutuhan pangan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan produksi pangan terdesak oleh laju penambahan penduduk, sehingga banyaknya penduduk meningkatkan jumlah permintaan pangan. Namun disisi lain, keberadaan lahan pertanian semakin menurun karena terjadinya kepadatan penduduk yang mengakibatkan alih fungsi lahan sehingga produksi pertanian juga akan menurun. Permintaan pangan yang tinggi dan keterbatasan produksi pangan menyebabkan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan semakin tinggi.

4. Kurangnya akses air bersih

Air adalah kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi keseimbangan cairan tubuh. Air bersih sangat diperlukan oleh manusia. Air bersih merupakan air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. Sumber air bersih yang kurang terlindungi mengakibatkan angka kesakitan meningkat dan menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan sehingga mempengaruhi status gizi setiap individu. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bandung, pada tahun 2022 sebanyak 3.558 rumah tangga belum memiliki akses air bersih yang disebabkan karena masyarakat tidak mampu membayar biaya air minum secara berlangganan, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.

5. Kurangnya tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan berperan untuk mengurangi angka penduduk yang sakit dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya makanan yang aman dan bergizi seimbang. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat. Kelurahan di Kota Bandung yang rentan terhadap ketahanan pangan disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja kesehatan.

KESIMPULAN

1. Pengembangan Infrastruktur Pangan yang Berkelanjutan:

- Merencanakan dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur penyediaan pangan yang berkelanjutan, termasuk perbaikan jaringan distribusi, penyediaan sarana penyimpanan dan distribusi yang modern, serta peningkatan aksesibilitas air bersih di daerah-daerah yang terpinggirkan.
- Mendorong investasi dalam teknologi hijau dan ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi pangan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

2. Penguatan Sektor UMKM Pangan dan Pertanian:

- Mengimplementasikan program dukungan dan pemulihan bagi UMKM di sektor pangan dan pertanian yang terdampak pandemi Covid-19, termasuk pemberian bantuan modal, pelatihan keterampilan, dan akses lebih mudah terhadap pasar.
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas pinjaman dengan suku bunga rendah atau subsidi bagi UMKM pangan dan pertanian.

3. Pendidikan dan Penyuluhan Gizi serta Kesehatan Masyarakat:

- Melakukan kampanye penyuluhan gizi dan kesehatan masyarakat secara massif di tingkat kelurahan, dengan fokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan bergizi seimbang.
- Menyelenggarakan program pelatihan untuk tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian lokal guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan kesehatan dan edukasi gizi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, Argi Lutfi (2023) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung
- Amalia, S., Maria, S., & Fitriani, D. (2024). The dynamics of food security in Indonesia: A study on the availability, affordability, and utilization of food in districts and cities with the lowest index in 2022. *International Journal of Economics*, 3(2).
- Arifin, A. L., & Solihin, D. (2025). Hilirisasi Pangan Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Kewirausahaan (JPEAKu)*, 5(2).
- Skripsi (S1), Thesis, Universitas Pasundan
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. (2023). Food Security And Vulnerability Atlas.

- Anonim. (2023, January 5). Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Untuk Mencapai Masyarakat yang Maju dan Mandiri
- Budiawati, Y., & Natawidjaja, R. S. (2020). Situasi Dan Gambaran Ketahanan Pangan di Provinsi Banten Berdasarkan Peta Fsva Dan Indikator Ketahanan Pangan. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 13(2), 187-204.
- Brida. (2023, September 26). Perubahan Iklim Mengancam Ketahanan Pangan. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. (2023). Food Security And Vulnerability Atlas: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bandung Tahun 2023.
- Hafiz Munjinadir. (2015). Analisis Eksistensi Lahan Pertanian Sawah di Kota Bandung.
- Hasanah, F., Setiawan, I., Noor, T. I., & Yudha, E. P. (2021). Pemetaan Sebaran Tingkat Alih Fungsi Lahan Sawah Di Kabupaten Serang. *Jurnal Agrica*, 14(2), 171–182.
- Universitas Pendidikan Indonesia | upi.edu perpustakaan.upi.edu.
- Lembaga Negara Republik Indonesia. (n.d.). Undang Undang RI [Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan].
- Listiana Habeahan. (2017). Respon Masyarakat Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman di Wilayah Gedebage Kota Bandung.\
- Muhammad Oni Triono (2018). Akses Air Bersih pada Masyarakat Kota Surabaya serta Dampak Buruknya Akses Air Bersih terhadap Produktivitas Masyarakat Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Universitas Airlangga*
- Nurul Husna, A. (2023). Ketahanan Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum di Kabupaten Pandeglang (Food Security Before and During The Covid-19 Pandemic In Pandeglang District) Agus Nurul Husna1 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Reisia, Kurniawan, Lukman (2018, Juni). Perspektif Tenaga Kesehatan: Budaya Keselamatan Pasien pada Puskesmas Poned di Kota Bandung. *Jurnal Sistem Kesehatan*
- Praba Ristadi Pinem, A. (2012). Optimalisasi Failover Instance Pada Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi FSVA Berbasis Spasial Kabupaten Brebes) (Doctoral dissertation, Program Studi Teknik Informatika FTI-UKSW).
- Tono, Mewa Ariani, & Achmad Suryana. (2023, Juni). Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia : Pembelajaran dari Penilaian dengan Kriteria Global dan Nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*.
- Trisna Subarna (2013). Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non-Pangan Penduduk Jawa Barat. *Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat*. jurnal.kemendagri.go.id
- Syakirotin, M., Karyani, T., & Noor, T. I. (2023, July). MODEL PENGARUH GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION DAN STRATEGI ALTERNATIF KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANDUNG SAAT PANDEMI COVID-19. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis* (Vol. 7, No. 1, pp. 48-55).
- Yudha, E. P., Syamsiyah, N., Pardian, P., & Dina, R. A. (2023). Rural areas are more resilient than urban areas to the COVID-19 pandemic. Is it true? (Lessons from Indonesia). *Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography*, 17(2).